



PENGARUH APLIKASI JAWA BARAT MANAJEMEN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TERINTEGRASI (JAPATI) TERHADAP PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Diva Rayidha Rinjani¹⁾, Dahly Sukmapryandhika Ar²⁾, Siti Munawaroh³⁾

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kualitas Laporan Kinerja belum sepenuhnya mengikuti PermenPANRB No. 53 Tahun 2014, minim informasi mengenai rekomendasi perbaikan, serta kurangnya analisis faktor yang memengaruhi capaian kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Aplikasi Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi (JAPATI) terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Aplikasi JAPATI sebagai variabel bebas (X) akan menggunakan teori karakteristik data atau informasi dalam sistem teknologi informasi milik Alter (1992) dalam (Kadir, 2014) dan pelaporan AKIP sebagai variabel terikat (Y) akan menggunakan teori prinsip-prinsip kualitas laporan yang baik (LAN RI, 2003). Metode yang digunakan adalah metode *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif dan teknis analisis data regresi linear sederhana. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Aplikasi Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi (JAPATI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nilai R Square sebesar 0,752 atau 75,2%. Sedangkan 0.248 atau 24,8% sisanya dijelaskan variabel lain di luar model regresi yang kemungkinan dapat dijelaskan oleh beberapa variabel, diantaranya yaitu variabel tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan pedoman yang berlaku, tingkat partisipasi dan keterlibatan seluruh jajaran perangkat daerah dalam pelaksanaan SAKIP, dan tingkat kompetensi sumber daya manusianya.

Kata Kunci: Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi, Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Abstract

This research is motivated by the fact that the quality of Performance Reports does not fully comply with PermenPANRB No. 53 of 2014, there is minimal information regarding improvement recommendations, and there is a lack of analysis of factors influencing performance achievement. The purpose of this study is to determine the influence of the West Java Integrated Government Agency Performance Management Application

(JAPATI) on performance accountability reporting of government agencies in the West Java Provincial Regional Government. The JAPATI application as the independent variable (X) will use Alter's (1992) theory of data or information characteristics in information systems (Kadir, 2014), and AKIP reporting as the dependent variable (Y) will use the theory of good report quality principles (LAN RI, 2003). The method used is explanatory research with a quantitative approach and simple linear regression data analysis techniques. This study concludes that the West Java Integrated Government Agency Performance Management Application (JAPATI) has a positive and significant influence on the reporting of government agency performance accountability in the West Java Provincial Regional Government, with an R-squared value of 0.752 or 75.2%. The remaining 0.248 or 24.8% is explained by other variables outside the regression model, which could potentially be explained by several variables, including compliance with applicable regulations and guidelines, the level of participation and involvement of all regional apparatus in the implementation.

Keywords: *Utilization of Information Technology Systems, Reporting, Performance Accountability, Regional Government Agencies of West Java Province.*

PENDAHULUAN

Kinerja organisasi publik merupakan aspek fundamental dalam menentukan sejauh mana sasaran yang telah dirancang dapat tercapai. Tingkat pencapaian tersebut menunjukkan *output* yang dihasilkan oleh individu maupun tim dalam struktur institusi sesuai dengan peran dan kewajiban masing-masing guna merealisasikan visi bersama secara optimal. Oleh karena itu, memahami cara kerja organisasi publik menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan kewajiban. Kinerja optimal mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif, memberikan layanan berkualitas, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.

Seiring perkembangan zaman dan persaingan global, organisasi publik dituntut terus meningkatkan kinerjanya melalui strategi inovatif, misalnya penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan langkah tersebut, organisasi publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pelayanan yang berkualitas tinggi. Dalam konteks inilah akuntabilitas kinerja menjadi sangat penting, sebab setiap anggota organisasi dituntut bertanggung jawab atas peran yang diemban. Akuntabilitas kinerja memungkinkan adanya pengukuran, penilaian, serta evaluasi yang transparan, sekaligus mendorong motivasi dan dedikasi

seluruh aparatur karena menyadari bahwa capaian kinerja berhubungan langsung dengan keberhasilan organisasi dan kesejahteraan publik. Akuntabilitas kinerja juga berperan sebagai sarana untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Melalui mekanisme peninjauan serta pemberian respons secara berkala, instansi pemerintahan dapat menilai perkembangan, mengatasi kendala, serta merancang strategi peningkatan kinerja di masa depan.

Untuk menjamin hal tersebut, pemerintah telah mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini dirancang sebagai mekanisme utama dalam mengevaluasi serta melaporkan capaian kinerja instansi negara, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dengan berlandaskan prinsip transparansi. SAKIP berfungsi memastikan bahwa setiap lembaga pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan kinerja resmi berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 menegaskan bahwa SAKIP terdiri atas rangkaian instrumen dan prosedur mulai dari pengukuran, perencanaan strategis, kesepakatan kerja, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Dengan demikian, SAKIP menjadi instrumen penting untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan SAKIP, elemen pelaporan kinerja menempati posisi sentral. Sesuai regulasi PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, penyusunan LKIP/LKJIP mencakup pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, penutup, lampiran, perjanjian kinerja, serta formulir rewiu. Dokumen ini berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga atas capaian program, sekaligus sarana evaluasi keberhasilan dan perbaikan kinerja ke depan. Namun, hasil evaluasi KemenPANRB tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat “memuaskan” dengan nilai 88,89 (kategori A), kualitas pelaporan kinerja masih belum sepenuhnya optimal. Kekurangan utamanya terletak pada penyusunan laporan yang belum informatif, tidak menyajikan analisis menyeluruh atas faktor penyebab keberhasilan maupun

kegagalan, serta minim rekomendasi perbaikan strategis (KemenPANRB, 2024).

Kesenjangan tersebut diperkuat dengan penelitian Fatimah (2024) yang menemukan bahwa implementasi SAKIP di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Masalah lain juga timbul dari kurangnya koordinasi antarunit serta keterbatasan integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Hambatan tersebut membuat pelaporan SAKIP kurang efektif. Meski demikian, upaya perbaikan telah dilakukan melalui pengembangan sistem informasi modern untuk mempercepat dan mempermudah akses data, sekaligus menurunkan risiko kesalahan manual (Fatimah, 2024).

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang inovasi berbasis digital bernama JAPATI (Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi), yang mulai diimplementasikan sejak 2023. Aplikasi ini dikembangkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan mempermudah pengukuran, perencanaan, dan evaluasi kinerja secara kolaboratif berbasis teknologi. JAPATI dibangun berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang SAKIP, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2023 sebagai panduan pelaksanaan SAKIP di tingkat daerah (Erwin, 2024).

JAPATI menghadirkan pendekatan manajemen kinerja terintegrasi yang menghubungkan kinerja institusi dengan kinerja individu melalui *logical framework* berbasis *critical success factor* (CSF). Aplikasi ini juga dilengkapi interoperabilitas dengan SKP-TRK, sehingga memungkinkan sinkronisasi antara perencanaan institusional dan individu. Fitur monitoring bersama memungkinkan seluruh pihak terkait untuk menilai progres pencapaian program secara berkala, dengan disertai mekanisme reward dan punishment. Dengan hadirnya JAPATI, proses pelaporan SAKIP diharapkan menjadi lebih efektif, informatif, dan berbasis data yang akurat (Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2024).

Selain itu, aplikasi JAPATI bersifat fleksibel sehingga dapat diadaptasi oleh berbagai instansi pemerintah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Model manajemen kinerja yang ditawarkan juga berpotensi direplikasi di daerah lain di Indonesia. Lebih lanjut, JAPATI mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan, seperti Bapenda, Inspektorat, perangkat daerah, serta kabupaten/kota, untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang lebih sinergis. Keunggulan lain dari aplikasi ini adalah konsolidasi data dalam *dashboard* terpadu yang memudahkan pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, JAPATI tidak hanya menjadi alat pelaporan, melainkan juga platform manajemen kinerja yang mendukung perencanaan, evaluasi, dan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh (Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2024).

Meski menjanjikan banyak manfaat, penelitian terdahulu (Fatimah, 2024) belum menjelaskan secara detail sejauh mana inovasi teknologi seperti JAPATI berpengaruh terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja. Hal ini menimbulkan *research gap* yang mendorong perlunya kajian lebih lanjut mengenai efektivitas aplikasi JAPATI dalam meningkatkan kualitas laporan kinerja. Dengan adanya celah penelitian tersebut, kajian ini difokuskan pada analisis pengaruh penggunaan JAPATI terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada dua komponen utama, yaitu penggunaan aplikasi JAPATI sebagai variabel independen dan pelaporan AKIP sebagai variabel dependen. Aspek yang diteliti dari JAPATI hanya mencakup karakteristik data dan informasi yang dihasilkan aplikasi, sedangkan aspek pelaporan AKIP dibatasi pada penyusunan laporan. Penelitian ini hanya dilakukan pada instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak mencakup pemerintah kabupaten/kota (Setda Jabar, 2024). Dengan fokus tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Bagaimana pengaruh penggunaan Aplikasi JAPATI terhadap kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat?”

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana JAPATI memengaruhi kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja. Tujuan akhirnya adalah memperoleh gambaran empiris mengenai efektivitas aplikasi JAPATI dalam mendukung peningkatan kualitas laporan AKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Erwin, 2024). Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis berupa peningkatan pemahaman mengenai pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi pemerintahan serta memperkaya literatur ilmiah di bidang akuntabilitas kinerja publik. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan gambaran faktual bagi pengambil kebijakan mengenai efektivitas aplikasi JAPATI, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

Pengaruh aplikasi JAPATI dapat ditinjau melalui teori karakteristik data atau informasi milik Alter (1992) dalam (Kadir, 2014) yang terdiri dari 7 (tujuh) dimensi, diantaranya: (1) Tipe data; (2) Tingkat akurasi dan presisi data; (3) Usia, ketepatan waktu, dan rentang waktu data; (4) Tingkat keringkasan dan kelengkapan data; (5) Kemudahan akses; (6) Sumber data; (7) Relevansi dan nilai data. Kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dapat ditinjau melalui teori prinsip-prinsip penyusunan pelaporan kinerja dari LAN RI (2003) yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi, diantaranya: (1) Prinsip lingkungan pertanggungjawaban; (2) Prinsip prioritas; (3) Prinsip manfaat.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan rancangan sistematis yang mengarahkan langkah-langkah pengumpulan dan pengolahan data untuk menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan hubungan kausal antara penggunaan aplikasi JAPATI (variabel bebas) dan kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Provinsi Jawa Barat (variabel terikat). Populasi penelitian mencakup 126 pegawai fungsional perencana di 46 unit kerja SKPD Jawa Barat, terdiri atas perencana ahli

madya (16), muda (60), pertama (49), dan utama (1). Sampel ditentukan dengan purposive sampling menggunakan rumus Slovin (margin of error 10%), menghasilkan 56 responden. Distribusi proporsionalnya ialah 7 ahli madya, 26 ahli muda, 22 ahli pertama, dan 1 ahli utama.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan studi pustaka. Kuesioner berbasis skala Likert (1–4) digunakan untuk menilai variabel, dengan kategori interpretasi sangat rendah hingga sangat tinggi. Analisis jawaban dilakukan dengan menghitung rata-rata, interval kelas (0,75), dan persentase capaian responden (kategori sangat rendah <49% hingga sangat tinggi 90–100%). Observasi digunakan untuk mengamati fenomena langsung, sedangkan studi pustaka memperkuat teori penelitian. Pengolahan data meliputi uji validitas (membandingkan r hitung dan r tabel) dan reliabilitas (menggunakan Cronbach's Alpha). Nilai $>0,70$ dianggap reliabel. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan data, termasuk nilai rata-rata, standar deviasi, serta uji asumsi klasik. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, heteroskedastisitas melalui scatterplot, dan linearitas berdasarkan *signifikansi deviation from linearity*.

Analisis inferensial dilakukan melalui uji korelasi Pearson untuk mengukur hubungan variabel, koefisien determinasi (R^2) untuk menilai besarnya pengaruh, serta regresi linier sederhana ($Y = a + bX$) untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan independen. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap terikat pada taraf $\alpha = 5\%$. Apabila asumsi parametrik tidak terpenuhi, penelitian menggunakan statistik non-parametris yang lebih fleksibel untuk menganalisis data ordinal, nominal, atau data yang tidak berdistribusi normal. Teknik ini tahan terhadap outlier, meskipun kurang efisien dibandingkan statistik parametrik jika asumsi normalitas terpenuhi.

Dengan desain ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengaruh penggunaan aplikasi JAPATI terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Jawa Barat.

PEMBAHASAN

Analisis Pengaruh Aplikasi Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi (Japati) Terhadap Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk mengetahui pengaruh aplikasi Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi (JAPATI) terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dilakukan penelitian dengan mengambil data dari 56 responden. Data tersebut kemudian diolah dalam aplikasi SPSS versi 27. Hasil analisis statistik akan dijabarkan dalam poin-poin berikut :

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2021), pengujian validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana instrumen kuesioner mampu mengukur konsep yang dimaksud. Sebuah item dalam kuesioner dianggap valid apabila isi pertanyaan atau pernyataannya benar-benar merepresentasikan variabel yang ingin diteliti. Penentuan validitas dilakukan dengan:

- 1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dikatakan valid;
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan dikatakan tidak valid.

Tabel 1 Kesimpulan Uji Validitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No	R Hitung	R Tabel	Keterangan
P1	0.858	0.2632	Valid
P2	0.906	0.2632	Valid
P3	0.865	0.2632	Valid
P4	0.874	0.2632	Valid
P5	0.807	0.2632	Valid
P6	0.885	0.2632	Valid

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Tabel 2 Kesimpulan Uji Validitas Aplikasi Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi (X)

No	R Hitung	R Tabel	Keterangan
P1	0.737	0.2632	Valid

P2	0.814	0.2632	Valid
P3	0.810	0.2632	Valid
P4	0.741	0.2632	Valid
P5	0.692	0.2632	Valid
P6	0.745	0.2632	Valid
P7	0.866	0.2632	Valid
P8	0.849	0.2632	Valid
P9	0.721	0.2632	Valid
P10	0.759	0.2632	Valid
P11	0.776	0.2632	Valid

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Merujuk pada hasil rekapitulasi dalam kedua tabel sebelumnya, seluruh butir pernyataan yang terdapat dalam variabel aplikasi JAPATI (X) maupun variabel pelaporan AKIP (Y) dinyatakan **valid** digunakan untuk pengambilan data di lapangan karena hasil menunjukkan $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach*, yang berfungsi untuk mengukur konsistensi internal dari instrumen penelitian. Nilai koefisien alpha berada dalam rentang 0 hingga 1, di mana angka 0 menunjukkan tidak adanya reliabilitas, sedangkan angka 1 mencerminkan tingkat reliabilitas yang sempurna. Berdasarkan pendapat para ahli seperti (Manning & Munro, 2006; Gregory, 2000; Nunally, 1978) dalam (Budiastuti & Budiastuti, 2018) menentukan nilai koefisien alpha sebagai berikut:

- 1) 0 = Tidak memiliki reliabilitas (*no reliability*);
- 2) $>.70$ = Reliabilitas yang dapat diterima (*Acceptable reliability*);
- 3) $>.80$ = Reliabilitas yang baik (*good reliability*);
- 4) $.90$ = Reliabilitas yang sangat baik (*excellent reliability*);
- 5) 1 = Reliabilitas sempurna (*perfect reliability*)

Berikut merupakan kesimpulan hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS:

Tabel 3 Tabel Kesimpulan Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Variabel	Cronbach Alpha	R Tabel	Keterangan
Pelaporan AKIP	0.932	0.70	Reliabel

Aplikasi JAPATI	0.933	0.70	Reliabel
-----------------	-------	------	----------

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, pernyataan kuesioner untuk mengukur variabel aplikasi JAPATI dan pelaporan AKIP memiliki **reliabilitas yang sangat baik (*excellent reliability*)** karena nilai *Cronbach Alpha* > r_{tabel} .

Uji Normalitas

Menurut Ghozali, pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing variabel dalam penelitian memiliki distribusi yang mendekati normal. Proses ini penting untuk memastikan kelayakan analisis statistik yang digunakan. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi:

- 1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka residual berdistribusi normal;
- 2) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal.

Untuk uji normalitas, peneliti menggunakan uji normalitas non parametrik Kolmogorov-Smirnov Test karena responden lebih dari 50, berikut merupakan hasilnya:

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.2308116
	Std. Deviation	2.04643737
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.038
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

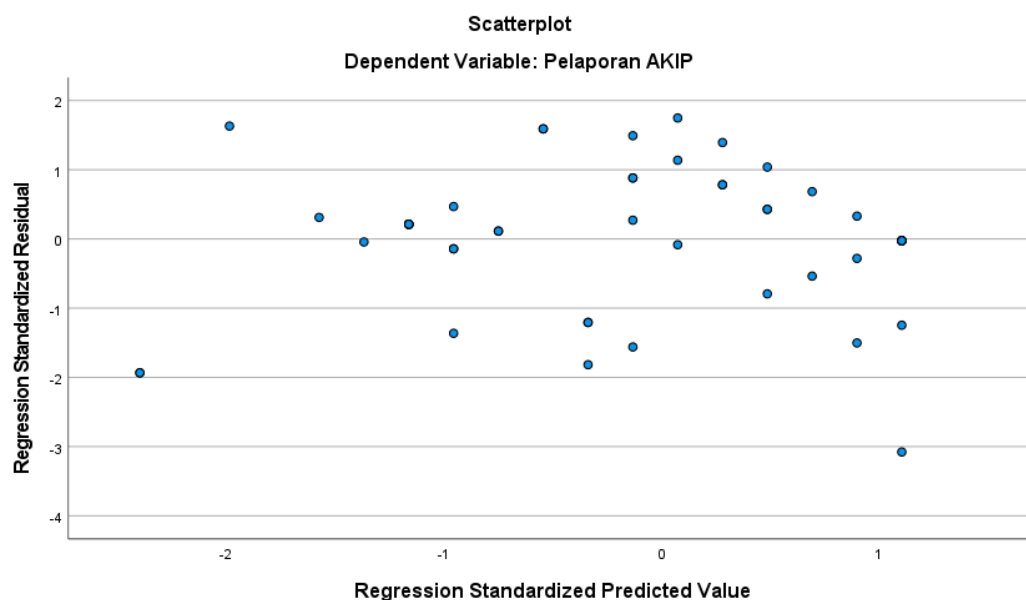
Merujuk pada hasil analisis dalam tabel di atas, nilai signifikansi (2-tailed) yang diperoleh adalah $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa **data berdistribusi normal**.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidakkonsistenan varians antar variabel. Ketidaksamaan varians ini dapat mengganggu keakuratan hasil analisis (Ghozali, 2021). Berikut adalah dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Apabila grafik scatterplot memperlihatkan pola tertentu, seperti gelombang yang kemudian mengecil atau menyempit, maka hal tersebut mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi;
- 2) Sebaliknya, jika titik-titik pada grafik tersebar secara acak di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas.

Grafik 1 Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas



(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Hasil pengamatan terhadap grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y tanpa

membentuk pola tertentu. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa **tidak mengalami gejala heteroskedastisitas**.

Uji Linearitas

Tabel 5 Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y	* Between	(Combined)	571.579	8	71.447	888.890	<.001
X	Groups	Linearity	571.493	1	571.493	7110.048	<.001
		Deviation from Linearity	.086	7	.012	.153	.993
	Within Groups		3.778	47	.080		
	Total		575.357	55			

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Merujuk pada hasil analisis dalam tabel di atas, nilai *deviation from linearity* yang diperoleh sebesar $0.993 > 0.05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y menunjukkan pola yang linear.

Uji Korelasi *Pearson Product Moment*

Hasil uji korelasi *pearson product moment* antara variabel aplikasi JAPATI (X) dengan variabel pelaporan AKIP (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Korelasi *Pearson Product Moment*

Correlations

		Pelaporan AKIP	Aplikasi JAPATI
Pelaporan AKIP	Pearson Correlation	1	.867**
	Sig. (2-tailed)		<.001
	N	56	56
Aplikasi JAPATI	Pearson Correlation	.867**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	
	N	56	56

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Tabel diatas menunjukkan nilai sig (2-tailed) sebesar $0.001 < 0.05$ maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antar variabel. Tingkat korelasi antar kedua variabel tersebut sebesar 0.867. Jika mengacu pada pedoman

derajat hubungan (koefisien korelasi), hubungan antara variabel aplikasi JAPATI dengan pelaporan AKIP bernilai sangat kuat (interval 0.80 – 1.00). Nilai korelasi sebesar 0.867 merupakan korelasi positif karena $0.867 > 0$, dapat diartikan bahwa semakin besar nilai variabel aplikasi JAPATI maka akan semakin besar pula nilai variabel pelaporan AKIP.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien ini menggambarkan proporsi seberapa besar perubahan pada variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai R Square mendekati angka 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.
- 2) Sebaliknya, apabila nilai R Square mendekati angka 1, maka variabel independen memiliki pengaruh yang kuat dan konsisten terhadap variabel dependen secara keseluruhan, sehingga model regresi dapat dianggap memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.867 ^a	.752	.747	1.638

a. Predictors: (Constant), Aplikasi JAPATI

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 75,2% variasi dalam pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel aplikasi JAPATI (X). Sementara itu, sisanya sebesar 24,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap berbagai literatur, nilai 24,8% memiliki kemungkinan dapat dijelaskan oleh beberapa variabel, diantaranya yaitu variabel tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan pedoman yang berlalu, tingkat partisipasi dan keterlibatan seluruh jajaran perangkat daerah dalam pelaksanaan SAKIP, dan tingkat kompetensi sumber daya manusianya.

Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.516	1.768		-.857	.395
	Aplikasi JAPATI	.581	.045	.867	12.790	<.001

a. Dependent Variable: Pelaporan AKIP

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Dari tabel koefisien regresi di atas diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + b.X_1$$

$$Y = -1.516 + 0.581 X_1$$

Hasil pengujian regresi terhadap variabel aplikasi JAPATI (X) menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,581. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu poin pada variabel aplikasi JAPATI akan diikuti oleh kenaikan sebesar 0,581 pada variabel pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Y).

Uji t (*Partial*)

Tabel 9 Hasil Uji t (*Partial*)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.516	1.768		-.857	.395
	Aplikasi JAPATI	.581	.045	.867	12.790	<.001

a. Dependent Variable: Pelaporan AKIP

(Sumber: Olahan Peneliti)

Berdasarkan hasil uji statistik yang ditampilkan dalam tabel di atas, diperoleh nilai *t* hitung sebesar 12,790, yang lebih tinggi dari *t* tabel sebesar 2,00488. Selain itu, nilai signifikansi (*2-tailed*) tercatat sebesar $0,001 < 0,05$.

Dengan demikian, **H₀ ditolak dan H_a diterima**. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel aplikasi JAPATI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi JAPATI terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata nilai variabel JAPATI (3,49) dan pelaporan akuntabilitas kinerja (3,48) sama-sama berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Analisis regresi menunjukkan koefisien sebesar 0,581 dengan koefisien determinasi 0,752, yang berarti 75,2% variasi pelaporan kinerja dijelaskan oleh penggunaan JAPATI, sementara 24,8% dipengaruhi faktor lain seperti kepatuhan regulasi, partisipasi perangkat daerah, dan kompetensi SDM. Uji statistik juga memperkuat hasil ini dengan nilai t hitung $12,790 > t$ tabel $2,00488$ serta $\text{sig } 0,001 < 0,05$, sehingga hipotesis mengenai pengaruh JAPATI terhadap peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja telah teruji secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alter, S. (1992). *Information Systems: A Management Perspective*. Addison-Wesley.
- Budiastuti, D., & Budiastuti, D. (2018). *Validitas dan Reliabilitas Penelitian*. Mitra Wacana Media.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kadir, A. (2014). *Buku Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. In *Edisi Revisi* (Issue January). ANDI Yogyakarta. <https://doi.org/10.13140/2.1.2637.6328>

ARTIKEL JURNAL

- Fatimah, Y. S. (2024). *Efektivitas Pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat*.

DOKUMEN PEMERINTAH

- Erwin. (2024). *Tim AK Dokumen Usulan Pembangunan Pengembangan Aplikasi JAPATI*.
- Kementerian PAN RB. (2024). *LHE AKIP 2024 Pemprov Jabar*.
- LAN. (2003). *PEDOMAN PENYUSUNAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*.
- Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. (2024). *Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PERMENPAN RB) No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2023 Tentang Pedoman
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat